



Legislatif Sebut Program Akan Terganggu

- Imbas Mundurnya Jadwal Pelantikan Kepala Daerah
- Hasto Sebut Jadi Peluang Mengetahui Persoalan Wilayah

JOGJA - Pelantikan kepala daerah yang sudah terpilih dalam Pilkada 2024 berpotensi mundur. Legislatif di Kota Jogja menilai kondisi itu akan mengganggu beberapa program yang bakal berjalan di tahun ini.

Wakil Ketua II DPRD Kota Jogja Triyono Hari Kuncoro mengatakan, mundurnya pelantikan kepala daerah memang tidak efektif. Terkhusus bagi daerah-daerah yang tidak menghadapi sengketa pada tahap pelaksanaan Pilkada 2024.

Kuncoro menyebut, dengan mundurnya pelantikan kepala daerah tentu akan membuat pasangan calon (paslon) tidak bisa langsung merealisasikan visi misi dan janji kampanyenya. Kemudian, juga akan menunda penyusunan rancangan peraturan daerah (raperda) tentang rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD).

Sebagaimana diketahui, RPJMD memang merupakan instrumen vital dalam berjalannya pemerintahan. Sebab merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah yang disusun untuk jangka waktu lima tahun. Sekaligus penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah terpilih.

"Selain itu, dengan pelantikan yang mundur, kepala daerah tidak bisa

melakukan *refocusing* anggaran. Padahal itu penting," ujar politikus PKS itu kemarin (12/1).

Kemudian di internal legislatif, kata Kuncoro, mundurnya pelantikan kepala daerah juga berpengaruh terhadap tugas pembuatan raperda atau peraturan wali kota (perwal). Lantaran keputusan kepala daerah terpilih cukup penting dalam proses penyusunan maupun pengesahan peraturan daerah.

Dia pun membandingkan dengan penyusunan raperda jika masih dilakukan penjabat wali kota, yang tidak jarang memakan waktu cukup lama. Sebab seorang kepala daerah yang merupakan penjabat tentu harus berkonsultasi dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

"Perwal yang dikonsultasikan ke Kemendagri bisa sampai tiga bulan, kalau wali kota definitif *kan* bisa cepat," sebut Kuncoro.

Sementara itu, wali Kota Jogja terpilih Hasto Wardoyo mengaku, tidak masalah jika pelantikan kepala daerah akan mundur dari jadwal sebelumnya.

Justru dengan mundurnya waktu pelantikan, Hasto mengaku, dapat memiliki waktu lebih untuk mencari informasi soal permasalahan yang ada di Kota Jogja. Sehingga ketika sudah resmi dilantik nantinya, dia bisa langsung tancap gas menyelesaikan berbagai permasalahan yang ada. "Strategi dan kebijakan saya susun mulai sekarang," ungkap Hasto. (inu/eno/fj)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1.	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 06 Agustus 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005